

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA BEKASI TAHUN 2020

¹Zhean Esa Anugrah

²Saifullah Zakaria

³Ivan Darmawan

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

^{2,3}Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

¹Email Korespondensi: zhean17001@mail.unpad.ac.id

Submitted: ,Reviewed: ,Accepted

ABSTRACT

Electronic-Based Government System (SPBE). SPBE has also been implemented in Bekasi City thanks to the issuance of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE. In 2020, Bekasi City did not yet have a Mayor's Regulation as a technical guide for implementing SPBE and has not conducted an independent evaluation of SPBE within the Bekasi City Government. This study aims to examine and measure the extent to which the maturity level of Bekasi City is implemented in SPBE. The research method uses a descriptive method with a qualitative approach, and the evaluation process is carried out following PermenPAN-RB Number 5 of 2018 concerning SPBE Evaluation Guidelines. The data collection techniques were carried out through observation, interviews, literature studies, documentation, and SWOT analysis. This study indicates that the City of Bekasi obtained an SPBE Index Value of 3.36 and was categorized as Good. Several aspects have not been optimized, namely the Internal Policy of SPBE Governance Aspects, Institutional Aspects, Strategy and Planning Aspects, and Information and Communication Technology Aspects that need further improvement. The results of the SWOT analysis also show that Bekasi City has Strengths and Opportunities that can outperform existing Weaknesses and Threats so that it has a good impact on the continuation of SPBE implementation in Bekasi City.

Keywords: *Bekasi City, SPBE, Evaluation, SPBE Index Value*

ABSTRAK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan di Kota Bekasi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pada tahun 2020, Kota Bekasi belum memiliki Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk teknis pelaksanaan SPBE dan belum melakukan evaluasi mandiri terhadap SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana tingkat kematangan Kota Bekasi dalam menerapkan SPBE. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan proses evaluasi dilakukan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan didukung dengan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi memperoleh Nilai Indeks SPBE sebesar 3.36 dan dikategorikan Baik. Terdapat beberapa aspek yang masih belum dioptimalkan yaitu pada Aspek Kebijakan Intenal Tata Kelola SPBE, Aspek Kelembagaan, Aspek Strategi dan Perencanaan, dan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan lebih lanjut. Hasil analisis SWOT yang dilakukan juga menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki Kekuatan dan Peluang yang dapat mengungguli Kekurangan dan Ancaman yang ada, sehingga berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi.

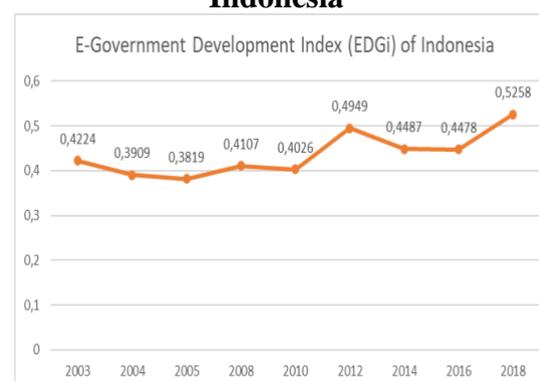
Kata Kunci: Kota Bekasi, SPBE, Evaluasi, Nilai Indeks SPBE

PENDAHULUAN

Era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang ada mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi menuju *E-Government* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tatalaksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi Rianto dan Lestari (2012:36). Sejak pertama kali menerapkan *E-Government* pada tahun 2003, Indonesia belum maksimal dalam mengaplikasikan *E-Government* dalam sistem pemerintahannya. Hal ini terlihat berdasarkan hasil pemeringkatan *E-Government Development Index* (EGDI) yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2018. Indonesia berada pada urutan 107 dari seluruh negara di dunia, dan berada di urutan ke-7 di ASEAN dengan nilai rata-rata 0,5258 dan berada di bawah rata-rata regional Asia Tenggara dengan nilai 0,5555. Sehingga, *E-Government* di Indonesia masih tertinggal dengan negara - negara lain di ASEAN. Penerapan *E-Government* di Indonesia masih menunjukkan tren negatif setelah 15 tahun berjalan sejak awal

kemunculannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pemeringkatan EGDI Indonesia pada 2003 hingga 2018.

Gambar 1 Perkembangan Nilai EDGI Indonesia



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021

Gambar tersebut menunjukkan grafik perkembangan *E-Government* di Indonesia masih kurang baik, maka Pemerintah Pusat melakukan pembenahan dan pembaharuan *E-Government* menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2018 dengan terbitnya Intruksi Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menyelenggarakan SPBE secara mandiri dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing serta mencapai tingkat kemajuan SPBE yang bervariasi antardaerah. Dalam penerapan SPBE tersebut dibutuhkan adanya evaluasi untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan SPBE di masing - masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi terhadap SPBE dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mendorong tiap-tiap Instansi Pemerintah dalam meningkatkan dan menjamin kualitas pelaksanaan SPBE yang mumpuni. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu Nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.¹ Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE. Evaluasi terhadap Instansi Pemerintahan ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, Kementerian PAN-RB dapat memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE pada masing - masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Kota Bekasi adalah salah satu Pemerintah Daerah yang menerapkan SPBE dan telah melakukan evaluasi

SPBE pada tahun 2019 dengan Nilai Indeks SPBE sebesar 3,34. Nilai tersebut dikategorikan Baik dan membawa pengaruh yang baik pula dalam pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui empat tahapan yaitu asistensi, tindak lanjut, evaluasi mandiri, dan evaluasi dokumen. Evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Kota Bekasi seluruhnya diserahkan kepada Bidang *E-Government* yang berada pada Dinas Kominfostandi Kota Bekasi, karena Kota Bekasi belum mempunyai Tim Evaluator Internal Kota Bekasi. Evaluasi mandiri ini dilakukan oleh Bidang *E-Government* melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pada tahap perencanaan, Bidang *E-Government* menyiapkan instrumen evaluasi SPBE dan melakukan sosialisasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi. Kemudian dilakukan pelaksanaan evaluasi SPBE, yaitu Bidang *E-Government* mengumpulkan semua data dari OPD yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi dan melakukan penilaian secara mandiri. Setelah data berhasil didapatkan maka dilakukan tahap pelaporan, yaitu Bidang *E-Government* menyusun hasil penilaian dan seluruh bukti dukung untuk disampaikan kepada Kementerian PAN-RB.

Disamping itu, Pemerintah Kota Bekasi masih tergolong baru dalam melaksanakan SPBE, karena dasar hukum dari pelaksanaan SPBE Kota Bekasi baru diterbitkan pada tahun 2020

¹ Pemenpan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

yaitu Perda Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Namun, pada tahun 2020 Kementerian PAN-RB tidak melakukan evaluasi SPBE terhadap Kota Bekasi, karena sedang terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keterbatasan waktu dan anggaran. Sehingga, pada tahun 2020 Kementerian PAN-RB hanya melakukan evaluasi SPBE terhadap 130 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk menjadi lokus evaluasi SPBE 2020,² yang mana Kota Bekasi tidak termasuk di dalamnya. Untuk tetap tetap menjaga optimalisasi dari SPBE di masing-masing Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah, Kementerian PAN-RB memberikan instruksi untuk melakukan evaluasi mandiri. Hal tersebut diinstruksikan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak termasuk dalam lokus evaluasi SPBE 2020 untuk tetap melakukan evaluasi dan membentuk Tim Evaluator Internal.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Bekasi tidak membentuk Tim Evaluator Internal dan tidak melaksanakan evaluasi mandiri pada tahun 2020. Terlebih, selama SPBE di Kota Bekasi berjalan, belum diterbitkan Peraturan Wali Kota yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan SPBE bagi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan kajian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi. Permasalahan tersebut akan didekati dengan melakukan evaluasi menggunakan model tingkat kematangan SPBE milik Kementerian PAN-RB yang terdiri dari 3 domain, 7

aspek, dan 35 indikator. Model tersebut didasari oleh Permenpan RB No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penulis menggunakan model tingkat kematangan SPBE milik Kementerian PAN-RB karena model tersebut merupakan hasil pengembangan dan improvisasi dari model-model tingkat kematangan yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu seperti Layne dan Lee (2001), Andersen dan Henriksen (2006), dan Kim dan Grant (2010).

Model kematangan ini digunakan untuk mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Sementara, tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE. Penjelasan mengenai tahap - tahap kematangan SPBE dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 - Rintisan	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 - Terkelola	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral. Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan terstandarisasi oleh semua unit organisasi terkait.
3 - Terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 - Terintegrasi dan Terukur	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 - Optimum	<ul style="list-style-type: none"> Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2020

² <https://spbe.go.id/evaluasi/FAQ>

Gambar 3 Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi

Tingkat	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2020

Model yang dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB mencakup secara luas pelaksanaan SPBE mulai dari tahap perencanaan, tata kelola, hingga output yang didapat oleh pengguna melalui layanan SPBE. Model ini mengedepankan integrasi sistem informasi, sehingga komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi dapat terlaksana dengan optimal, serta memudahkan pelayanan publik.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi ditinjau menggunakan model tingkat kematangan SPBE milik Kementerian PAN-RB. Penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis SWOT, sehingga hasil evaluasi yang ada diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kota Bekasi untuk meningkatkan Nilai Indeks SPBE pada tahun - tahun berikutnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dijabarkan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap domain maupun aspek yang masih belum optimal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan oleh penulis untuk memberi gambaran atau

lukisan secara sistematis mengenai sejauh mana kondisi pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi, sehingga hasil evaluasinya dapat dideskripsikan secara aktual, realistis, dan nyata. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis karena perumusan informasi-indormasi mengenai evaluasi pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi dilakukan melalui kajian dan telaah terhadap situasi, kondisi, serta penerapan SPBE oleh para pelaku pelaksana SPBE di Kota Bekasi.

Metode penilaian evaluasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Metode penilaian evaluasi yang digunakan berdasarkan pengukuran tingkat kematangan menggunakan model yang dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB yang tertuang dalam PermenPAN RB No 5 Tahun 2018. Selanjutnya mengenai tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Tingkatan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Fungsi

Tingkat	Kapabilitas Proses	Kapabilitas Fungsi
1	Rintisan	Informasi
2	Terkelola	Interaksi
3	Terstandardisasi	Transaksi
4	Terintegrasi dan Terukur	Kolaborasi
5	Optimum	Optimalisasi

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021

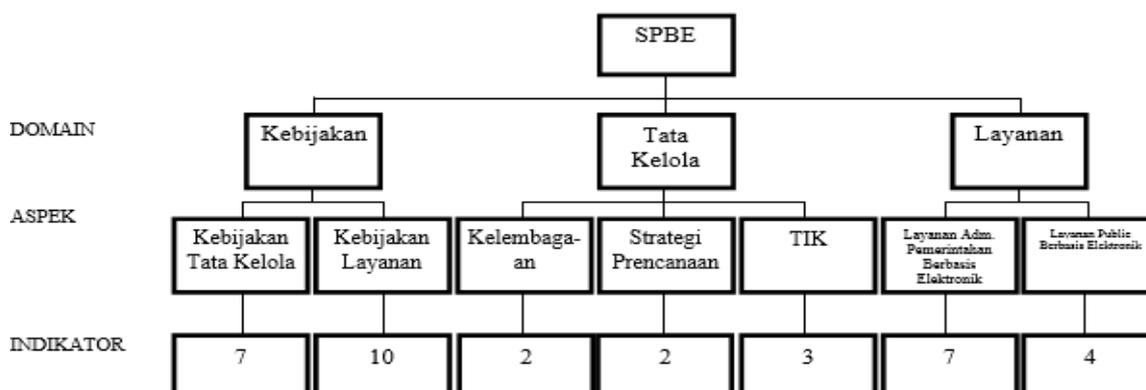
Semakin tinggi tingkatan yang didapat oleh sebuah instansi, maka pelaksanaan SPBE yang dilakukan oleh instansi tersebut semakin matang.

Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi kepada Dinas Kominfo Kota Bekasi sebagai pelopor pelaksanaan

SPBE di Kota Bekasi dan persiapan terhadap instrumen evaluasi yang akan digunakan. Instrumen yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Instrumen Evaluasi SPBE



Sumber: Muka dkk, 2020

Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui observasi sistematis, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

- Observasi sistematis, yakni melakukan pengumpulan data melalui kerangka dan indikator spesifik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- Wawancara mendalam, yakni melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan untuk mendapatkan jawaban secara utuh.
- Dokumentasi, yakni melakukan penilaian tingkat kematangan berdasarkan dokumen yang terdapat pada Dinas Kominfo Kota Bekasi berupa bukti pendukung untuk menjamin keabsahan data yang didapat saat observasi sistematis dan wawancara mendalam.

Tahap Pelaporan

Pada tahapan dilakukan penyusunan hasil penilaian berdasarkan instrumen evaluasi pada tabel 2.1. Hasil evaluasi berupa Nilai Indeks SPBE dan rekomendasi perbaikan berdasarkan penilaian dan analisis SWOT yang telah dilakukan.

Tabel 2. Nilai Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka secara detail hasil penilaian masing - masing domain, aspek, dan indikator dijabarkan pada tabel 3, tabel 4, dan tabel 5.

Tabel 3. Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Nilai	Indeks Akhir
Domain 1 : Kebijakan SPBE		17%		3,35
Aspek 1 : Kebijakan Tata Kelola SPBE		7%	2,57	1,06
Indikator 1	Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1%	1	0,14
Indikator 2	Kebijakan Inovasi proses bisnis terintegrasi	1%	4	0,57
Indikator 3	Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1%	4	0,57
Indikator 4	Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK	1%	2	0,29
Indikator 5	Kebijakan Pengoperasian Pusat Data	1%	3	0,43
Indikator 6	Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi	1%	3	0,43
Indikator 7	Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1%	1	0,14
Aspek 2 : Kebijakan Layanan SPBE		10%	3,90	2,29
Indikator 8	Kebijakan Layanan Naskah Dinas	1%	3	0,30
Indikator 9	Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian	1%	3	0,30
Indikator 10	Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	1%	5	0,50
Indikator 11	Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan	1%	4	0,40
Indikator 12	Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja	1%	4	0,40
Indikator 13	Kebijakan Layanan Pengadaan	1%	5	0,50
Indikator 14	Kebijakan Layanan Pengaduan Publik	1%	4	0,40
Indikator 15	Kebijakan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1%	3	0,30
Indikator 16	Kebijakan Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	1%	3	0,30
Indikator 17	Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah	1%	5	0,50

Tabel 4. Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Nilai	Indeks Akhir
Domain 2 : Tata Kelola SPBE		28%		2,29
Aspek 3 : Kelembagaan		8%	2,00	0,57
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	4%	1	0,50
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	4%	3	1,50
Aspek 4 : Strategi dan Perencanaan		8%	2,50	0,71
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	4%	3	1,50
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK	4%	2	1,00
Aspek 5 : Teknologi Informasi dan Komunikasi		12%	2,33	1,00
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data	4%	3	1,00
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi	4%	3	1,00
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	4%	1	0,33

Tabel 5. Nilai Indeks Domain Layanan SPBE

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Nilai	Indeks Akhir
Domain 3 : Layanan SPBE		55%		3,91
Aspek 6 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		35%	4,14	2,64
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas	5%	4	0,57
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian	5%	4	0,57
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan	5%	4	0,57
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran	5%	4	0,57
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan	5%	4	0,57
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja	5%	4	0,57
Indikator 31	Layanan Pengadaan	5%	5	0,71

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Nilai	Indeks Akhir
Aspek 7 : Layanan Publik Berbasis Elektronik		20%	3,50	1,27
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik	3,3%	4	0,67
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3,3%	2	0,33
Indikator 34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	3,3%	3	0,50
Indikator 35-1	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1	3,3%	4	0,67
Indikator 35-2	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2	3,3%	4	0,67
Indikator 35-3	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3	3,3%	4	0,67

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan tabel 3, tabel 4, dan tabel 5 diatas, maka dapat dilakukan perhitungan terhadap domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, dan domain layanan SPBE menjadi Nilai Indeks SPBE Kota Bekasi secara keseluruhan. Perhitungan Nilai Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Perhitungan Nilai Indeks SPBE

Domain	Bobot	Nilai Indeks
Domain Kebijakan SPBE	17%	3,35
Domain Tata Kelola SPBE	28%	2,29
Domain Layanan SPBE	55%	3,91
Total Nilai Indeks		3,36

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Kota Bekasi mendapatkan Nilai Indeks SPBE Sebesar 3,36 pada tahun 2020 dan dikategorikan “**Baik**”. Nilai Indeks SPBE Kota Bekasi mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 3,43. Melalui pengukuran yang dilakukan pada 3 domain, terlihat bahwa domain Layanan SPBE memiliki Nilai Indeks yang paling tinggi sebesar 3,91. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan oleh Kota Bekasi sudah sangat baik. Kemudian, Nilai Indeks yang paling kecil diperoleh pada domain tata kelola SPBE sebesar 2,29, sehingga perlu banyak perbaikan untuk memaksimalkan tata kelola SPBE yang efektif dan berdampak.

Tabel 7. Rekomendasi terhadap hasil evaluasi SPBE

No	Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi
1	Pemerintah Kota Bekasi segera menetapkan Tim Pengarah SPBE dan Tim Evaluator Internal SPBE yang dituangkan dalam Peraturan Daerah / Peraturan Wali Kota / Keputusan Walikota atau sejenisnya.
2	Pemerintah Kota Bekasi diharapkan mengeluarkan Peraturan Wali Kota mengenai SPBE yang dapat menjadi petunjuk teknis pelaksanaan SPBE di lingkup Pemerintah Kota Bekasi.
3	Melakukan peninjauan kembali terhadap aplikasi dan layanan yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, apabila terdapat aplikasi yang memiliki fungsi sama dengan Pemerintah Pusat maka diharap menerapkan penggunaan aplikasi berbagi pakai.
4	Mengadakan seminar, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), dan standarisasi terhadap para ASN khususnya di Bidang IT, untuk menunjang pelaksanaan SPBE.
5	Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai SPBE dan memberikan informasi mengenai layanan dan fitur yang terdapat pada berbagai aplikasi pelayanan publik.
6	Memperkuat tingkat keamanan pada aplikasi - aplikasi dan layanan yang berbasis elektronik, khususnya pada aplikasi yang memuat informasi penting bagi pemerintah dan informasi pribadi milik masyarakat.

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021

Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam memecahkan permasalahan dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berasal dari faktor internal maupun eksternal di Kota Bekasi. Analisis SWOT digunakan untuk membandingkan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman (Rangkuti, 2017:28). Hasil perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat berguna untuk menentukan rumusan, memprediksi, dan menyusun strategi. Berikut adalah pemaparan SWOT penerapan SPBE di Kota Bekasi:

Strengths (Kekuatan)

1. Sudah memiliki dasar hukum
2. Sudah menjadi komitmen Walikota Bekasi dalam Renstra Kota Bekasi untuk mendukung SPBE
3. Dukungan SDM yang baik dan tersebar di setiap perangkat daerah
4. Sarana dan prasarana yang memadai

Weaknesses (Kelemahan)

1. Pola pikir ASN masih belum terbiasa dengan penerapan SPBE
2. Kurangnya penguasaan kompetensi ASN pada bidang IT
3. Manajemen anggaran untuk SPBE di Kota Bekasi belum diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan penerapan SPBE

Opportunities (Peluang)

1. Kota Bekasi dekat dengan Ibu Kota

2. SDM yang sudah cukup paham dengan teknologi
3. Sarana dan prasarana yang terus bertambah
4. Penawaran kerjasama dari pihak eksternal
5. Evaluasi dari KemenPAN-RB setiap tahun

Threats (Ancaman)

1. Peretas aplikasi yang bisa muncul kapan saja
2. Keamanan di beberapa aplikasi masih harus diperkuat
3. Pola kebijakan yang sering berubah - ubah ketika terjadi posisi pergantian kepala daerah

Berdasarkan pemaparan analisis SWOT mengenai kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kota Bekasi dalam menerapkan SPBE, maka penulis menyusun strategi untuk mendalami dan memberikan upaya yang dapat ditempuh Kota Bekasi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang ada.

a. Strategi SO (*Strengths - Opportunities*)

1. Memaksimalkan kualitas SDM, sarana, dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang untuk mempermudah ASN dan masyarakat dalam menerapkan SPBE. (S3, S4, O3, O4)
2. Memperkuat dan melengkapi regulasi agar dapat menjalin kerjasama dengan pihak eksternal sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. (S1, S2, O5)

b. Strategi ST (*Strengths - Threats*)

1. Melakukan pelatihan dan standardisasi kepada para ASN untuk dapat memanfaatkan sarana, prasarana, dan perkembangan teknologi yang telah tersedia di Kota Bekasi. (W1, W2, O1, O3)

c. Strategi WO (*Weaknesses- Opportunities*)

1. Memaksimalkan SDM dalam bidang IT untuk meningkatkan keamanan situs web dan aplikasi agar terhindar dari para peretas. (S3, T1, T2)
2. Melengkapi dasar hukum dan menetapkan manajemen perubahan untuk mengantisipasi perubahan pola kebijakan internal dan eksternal (S1, S2, T3)

d. Strategi WT (*Weaknesses - Threats*)

1. Meningkatkan kompetensi dan membudayakan penggunaan elektronik terhadap para ASN untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan ancaman yang mungkin terjadi. (W1, W2, T1, T3)

Upaya Alternatif terhadap hasil Evaluasi SPBE dan Analisis SWOT pada SPBE Kota Bekasi

1. Memaksimalkan kualitas SDM, sarana, dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang.
2. Memperkuat dan melengkapi regulasi yang telah dibuat oleh Kota Bekasi agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap pihak eksternal ketika menjalin kerjasama..

3. Memaksimalkan SDM yang sudah dimiliki khususnya dalam bidang IT agar dapat meningkatkan jaringan keamanan yang ada pada beberapa aplikasi dan situs website.
4. Melengkapi dasar hukum yang sudah berlaku dan menetapkan manajemen perubahan.
5. Mengadakan pelatihan - pelatihan, seminar, dan melakukan standardisasi kompetensi terhadap para ASN.
6. Meningkatkan kompetensi para ASN di bidang IT dan membudayakan penggunaan elektronik kepada seluruh ASN di Kota Bekasi agar dapat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, menyesuaikan dengan perubahan pola kebijakan, serta dapat mengatasi ancaman yang mungkin terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Bekasi yang dilakukan pada Dinas Komifostandi sudah berjalan dengan cukup baik. Proses evaluasi dan penilaaian yang dilaksanakan mengacu pada PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pengukuran dilakukan terhadap 3 domain, 7 aspek, dan 35 indikator SPBE. Selain itu, analisis SWOT juga digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki Kota Bekasi dalam menerapkan SPBE.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPBE oleh Pemerintah Kota Bekasi saat ini telah berjalan dengan baik, hal ini sejalan

dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan Kota Bekasi memperoleh Nilai Indeks SPBE sebesar 3,36 dengan predikat “BAIK”. Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyimpulkan hal - hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi SPBE di Kota Bekasi ditinjau dari masing - masing aspek:
 - a. Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE masih dikategorikan Cukup, sehingga masih butuh peningkatan dari segi kebijakan dan regulasi.
 - b. Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE sudah dikategorikan Sangat Baik, kebijakan yang ada sudah mengatur secara detail mengenai layanan SPBE di Kota Bekasi.
 - c. Aspek Kelembagaan masih dikategorikan Cukup. Tim Pengarah SPBE dan Tim Evaluator Internal belum resmi ditetapkan dan belum memiliki dasar hukum yang mengikat.
 - d. Aspek Strategi dan Perencanaan masih dikategorikan Cukup. Kota Bekasi masih menggunakan Rencana Induk TIK yang dibuat pada tahun 2016 dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan SPBE. Anggaran untuk pelaksanaan SPBE juga masih belum dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan SPBE
 - e. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi masih dikategorikan Cukup. Pengoperasian pusat data dan integrasi sistem aplikasi sudah Baik, namun penggunaan aplikasi umum berbagi pakai masih belum diterapkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
 - f. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dikategorikan Sangat Baik.

Seluruh layanan yang berkaitan dengan tata kelola dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sudah diterapkan dengan sangat baik.

- g. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik sudah dikategorikan Baik, layanan pengaduan publik dan layanan publik instansi pemerintah sudah Sangat Baik diterapkan oleh Kota Bekasi. Namun, layanan JDIH masih membutuhkan peningkatan layanan agar dapat menerapkan layanan transaksi
2. Kekuatan dan Peluang terhadap pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi dapat mengungguli Kelemahan dan Ancaman yang ada. Hal ini dapat berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi.
 3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan hasil strategi silang analisis SWOT yaitu melengkapi dan memperkuat kebijakan yang ada, meningkatkan kualitas SDM di bidang IT dan melakukan standarisasi kompetensi bagi para ASN, serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia dengan optimal.

REFERENSI

- Muka, Wayan, dkk. 2020. *Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali*. Jurnal Bali Membangun Bali, 1(3), 253–276
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rianto, Budi dan Lestari, Tri. 2012. *Polri & Aplikasi E-Government*.

Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020.

https://publicadministration.un.org/egov_kb/en-us/About/Overview/-EGovernment-Development-Index
(-Diakses pada 1 Februari 2021 Pukul 22.35 WIB).

<https://spbe.go.id/moneval> (Diakses pada 8 Februari 2021 Pukul 22.11 WIB).

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku pelaksana SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada keluarga besar Dinas Kominfostandi Kota Bekasi atas bantuan, kerjasama dan koordinasi yang baik, khususnya Kepala Dinas Kominfostandi beserta staf dan jajarannya.